PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI UTS

BAB 1
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA

KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

1. PEREKONOMIAN INDONESIA MEMILIKI CIRI YANG KHAS YANG BERBEDA DENGAN NEGARA YANG LAIN, DIMANA PERAN PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN LINI KEHIDUPAN MASYARAKATNYA TERLALU BESAR TERUTAMA DIMULAI SEJAK REZIM ORDE BARU BERKUASA.
2. MASA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA SANGAT MENENTANG SISTEM PEREKONOMIAN KAPITALIS DAN LIBERALISASI DAN CONDONG KE IDEOLOGI POLITIK DAN SOSIALIS
3. INDONESIA MERUPAKAN NEGARA BERPENDUDUK TERBANYAK NO 5 DIDUNIA SETELAH NEGARA RRC, INDIA, RUSIA DAN AS. 2/3 JUMLAH PENDUDUKNYA TINGGAL DI JAWA, MADURA DAN BALI YANG MERUPAKAN 7% DARI KESELURUHAN DARATAN. TINGKAT KEPADATAN PENDUDUKNYA DI JAWA HAMPIR 2 X LIPAT DI BANDINGKAN DENGAN KEPADATAN PENDUDUK DI EROPA (BELGIA)

4. FAKTA MENUNJUKKAN PEREKONOMIAN INDONESIA MEWARISI DUALISTIK SIFAT PEREKONOMIANNYA YAITU (MENURUT BOEKE)
   A. SEKTOR MODERN (PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN PERINDUSTIAN BESAR)
   B. SEKTOR TRADISIONAL (PERTANIAN, KERAJINAN TANGAN DAN PERDAGANGAN KECIL TRADISIONAL)
5. ASPEK PENDAPATAN DAN KEKAYAAN INDONESIA TERMASUK RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN WALAU KEKAYAAN ALAM MELIMPAH .
6. KEMAMPUAN PENGADAAN DAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR JUGA RENDAH, DISEBABKAN OLEH :
   A. RENDAHNYA PENDAPATAN PER KAPITA MASYARAKAT
   B. MISMANAJAMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN POLITIK YANG MENYEBABKAN TERBENGKALAINYA AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI TERUTAMA PADA SAAT ORDE LAMA DAN ORDE BARU
   C. MARAKNYA PRAKTEK KKN (MENURUT PROF. SAMITRO)

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

1. PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DILAKUKAN SESUAI DENGAN AMANAT UUD 1945 YAITU MENINGKATKAN TARAF HIDUP & KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA.
2. TAHAPAN PEMBANGUNAN NASIONAL DILAKUKAN DENGAN CARA :
   A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
   B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
3. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DILAKUKAN DENGAN MENGACU PADA :
   A. DI LAKSANAKAN DENGAN BERKELANJUTAN
   B. DAPAT DINIKMATI OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

MASALAH & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DI INDONESIA ADALAH :

A. TINGGINYA JUMLAH PENGANGGURAN DAN PENDUDUK MISIKIN
B. RENDAHNYA KUALITAS SDM
C. KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KELOMPOK, WILAYAH DAN DAERAH
E. MENURUNNYA KUALITAS SDM & LINGKUNGAN HIDUP
F. RENDAHNYA PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN
G. TINGGINYA ANGKA KEJAHATAN DAN MASIH ADANYA PONTENSI KONFILK HORISONTAL
H. ANCAMAN SAPARATISME & RENDAHNYA KEMAMPUAN HANKAM
I. KELEMBAGAAN DEMOKRASI YANG MASIH LEMAH

BAB 2
SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA PEMERINTAHAN REFORMASI – (SAMPAI SEKARANG)

- GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

  BERDASARKAN PENDEKATAN KRONOLOGIS HISTORIS SUBTANSI PEREKONOMIAN INDONESIA DIGOLONGKAN MENJADI:

  1. MASA SEBELUM TERJAJAH (SEBELUM TAHUN 1600)
  2. MASA PENJAJAHAN (1600-1945)
  3. MASA SEBELUM 1966 (SEJAK MERDEKA)
  4. MASA SESUDAH 1966 (SEJAK ORDE BARU)
  5. MASA SESUDAH ORBA (MASA REFORMASI EKONOMI)
  6. MASA REFORMASI - SEKARANG

AD 1 DAN AD 2 TIDAK DIBAHAS

AD 3 MASA SEBELUM 1966 / ORDE LAMA

- SEJAK MERDEKA SAMPAI 1966; PEREKONOMIAN INDONESIA KURANG BERKEMBANG. KABINET SELALU BERGANTI SEHINGGA PEREKONOMIAN INDONESIA MENGIKUTI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI KABINET YBS
- POLITIK TIDAK STABIL SEHINGGA PEREKONOMIAN INDONESIA JUGA TIDAK STABIL.
- NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING MENJADI BUMN :

  NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING TERUTAMA MILIK BELANDA MULAI TAHUN 1951.
- DALAM SISTEM MONETER :

  A. TAHUN 1946 DIDIRIKAN BANK NEGARA INDONESIA (BNI)

  B. DE JAVACHE BAK (BELANDA) DIAMBIL ALIH MENJADI BI (BANK SENTRAL) TAHUN 1953.

  TUGASNYA :

  1. MENSTABILKAN NILAI RUPIAH
  2. MENGATUR SIRKULASI UANG
  3. MENGAWASI SERTA MENGEMBANGKAN PERBANKAN DAN KREDIT
  4. MONOPOLI PEREDARAN UANG KARTAL CADANGAN MINIMUM 20 % DALAM BENTUK EMAS DAN VALUTA ASING.

1. KABINET HATTA : REFORMASI MONETER MELALUI DEVALUASI MATA UANG NASIONAL YANG PADA SAAT ITU MASIH GULDEN DAN PEMOTONGAN UANG SEBESAR 50% ATAS SEMUA UANG KERTAS YANG BEREDAR PADA BULAN MARET 1950 YANG DIKELUARKAN OLEH DE JAVASCHE BANK YANG BERNILAI NOMINAL LEBIH DARI 2,50 GULDEN INDONESIA
2. KABINET NATSIR : UNTUK PERTAMA KALINYA DIRUMUSKAN SUATU PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKNOMI, YANG DISEBUT RENCANA URGENSI PEREKONOMIAN (RUP)
3. KABINET SUKIMAN : NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK MENJADI BANK INDONESIA (BI) DAN PENGHAPUSAN SYSTEM KURS BERGANDA
4. KABINET WILOPO : UNTUK PERTAMA KALINYA MEMPERKENALKAN KONSEP ANGGARAN BERIMBANG DALAM APBN, MEMPERKETAT IMPOR, MALAKUKAN "RASIONALISASI" ANGKATAN BERSENJATA MELALUI MEDERNISASI DAN PENGURANG JUMLAH PERSONIL, DAN PENGIRITAN PENGELUARAN PEMERINTAH
5. PADA MASA KABINET AMI I, HANYA DUA LANGKAH KONKRET YANG DILAKUKAN DALAM BIDANG EKONOMI, YAKNI PEMBATASAN IMPOR DAN KEBIJAKAN UANG KETAT

6. KABINET BURHANUDDIN, TINDAKAN-TINDAKAN EKONOMI PENTING YANG DILAKUKAN TERMASUK DIANTARANYA ADALAH LIBERALISASI IMPOR, KEBIJKAN UANG KETAT UNTUK MENEKAN LAJU UANG BEREDAR, DAN PENYEMPURNAAN PROGRAM BENTENG, MENGELUARKAN KEBIJAKAN YANG MEMPERBOLEHKAN MODAL (INVESTASI) ASING MASUK KE INDONESIA, PEMBERIAN BANTUAN KHUSUS KEPADA PENGUSAHA-PENGUSAHA PRIBUMI, DAN PEMBATALAN (SECARA SEPIHAK) PERSETUJUAN KONFERENSI MEJA BUNDAR SEBAGAI USAHA UNTUK MENGHILANGKAN SYSTEM EKONOMI KOLONIAL ATAU MENGHAPUSKAN DOMINASI PERUSAHAAN- PERUSAHAAN BELANDA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
7. KABINET ALI I, PRAKTIS TIDAK ADA LANGKAH LANGKAH YANG BERARTI, SELAIN MENCANANGKAN SEBUAH RENCANA PEMBANGUNAN BARU DENGAN NAMA RENCANA LIMA TAHUN 1956-1960
8. PADA MASA KABINET DJUANDA : DILAKUKAN PENGAMBILAN (NASIONALISASI) PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA

AD 4 MASA SESUDAH 1966 (ORBA)

1966 - 1968 MASA STABILISASI DAN REHABILITASI EKONOMI

PROGRAM EKONOMI JANGKA PENDEK YAITU :

1. TAHAP PENYELAMATAN (JULI – DES 1966)
2. TAHAP REHABILITASI (JAN - JULI 1967)
3. TAHAP KONSOLIDASI (JULI - DES 1967)
4. TAHAP STABILISASI (JAN – JULI 1968)

PROGRAM JANGKA PANJANG TERDIRI ATAS RANGKAIAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) YANG DIMULAI APRIL 1969. TAHUN 1969 MERUPAKAN MASA PEMBANG EKONOMI. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DIMULAI SEJAK 1 APRIL 1969 REPELITA.

PELITA I	: 1969 – 1974
PELITA II	: 1974 – 1979
PELITA III	: 1979 – 1984
PELITA IV	: 1984 -1989
PELITA V	: 1989 – 1994
PELITA VI	: 1994 – 1999

SETELAH REFORMASI

- **PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI INDONESIA 2005-2012**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Realisasi Semester I 2012
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,5	6,2	6,1	4,5	6,1	6,5	6,7	6,4
Inflasi (%)	17,4	6,6	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	5,3	4,58 (Agustus)
Nilai Tukar (Rp/US$)	9.850	9.197	9.376	10.450	9.447	9,087	8,700	8,800	9.512 (akhir Agustus)
BI Rate (%)	12,75	9,75	8,00	9,25	6,5	6,6*	5,6*	6,0*	4,04 (09 Agustus 2012)
Suku Bunga Deposito 12 Bulan	10,35	11,63	8,24	10,43	10,69	7,88	7,06	6,48 (Juli 2012)	
Suku Bunga Kredit Modal Kerja (%)	13,41	16,23	15,07	13,00	15,22	12,83	12,09	11,80 (Juli 2012)	
Suku Bunga Kredit Investasi (%)	14,05	15,66	15,10	13,01	14,40	12,28	11,73	11,46 (Juli 2012)	
Suku Bunga Kredit Konsumsi (%)	16,57	16,83	17,58	16,13	16,40	14,53	14,19	13,90 (Juli 2012)	

STRUKTUR KONSUMSI RT INDONESIA

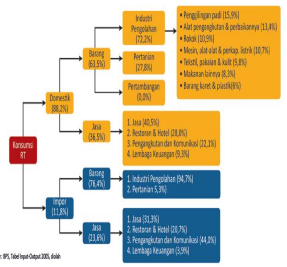

Sumber: BPS, Tabel Input-Output 2005, diolah

KEBIJAKAN REFORMASI STRUKTURAL

Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 (kwartalan)

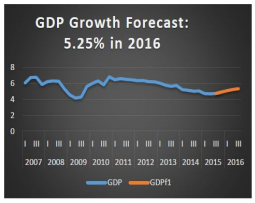

Sumber: Research Intelligence Unit FEB UI

Gambar 3. Proyeksi Inflasi tahun 2016

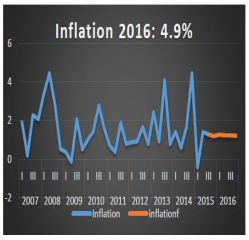

Sumber: Research Intelligence Unit FEB UI

BAB 3
SISTEM DAN POLITIK EKONOMI INDONESIA

A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI

1. SISTEM ADALAH SEHIMPUNAN GAGASAN (IDE), PRINSIP, DOKTRIN, HUKUM DAN SEBAGAINYA YANG MEMBENTUK SUATU KESATUAN YANG LOGIK DAN BERISI BUAH PIKIRAN TERTENTU, AGAMA ATAU BENTUK PEMERINTAH TERTENTU
2. PEREKONOMIAN ADALAH SESUATU YANG MEMBAHAS TENTANG KEBUTUHAN MANUSIA DENGAN SUMBER DAYA YANG TERBATAS DAN TIDAK TERBATAS
3. SISTEM PEREKONOMIAN ADALAH SISTEM YANG DIGUNAKAN OLEH SUATU NEGARA UNTUK MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKINYA BAIK KEPADA INDIVIDU MAUPUN ORGANISASI DI NEGARA TERSEBUT.
4. SISTEM MENGANDUNG CIRI-CIRI SEBAGAI BERIKUT :
   a. MEMILIKI TUJUAN
   b. MEMPUNYAI BATAS, BERSIFAT TERBUKA DAN BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN.
   c. TERDIRI DARI SUBSISTEM ATAU DISEBUT DENGAN BAGIAN, UNSUR ATAU KOMPONEN.
   d. SUATU KESATUAN YANG UTUH DAN KETERPADUAN (WHOLSIM)
   e. SALING BERHUBUNGAN DAN KETERGANTUNGAN BAIK INTERNAL DAN EKSTERNAL
   f. TERDAPAT MEKANISME KONTROL DENGAN MEMANFAATKAN TERSEDIANYA UMPAN BALIK

5. SECARA KATAGORI SISTEM EKONOMI YANG BEROPERASI SEKARANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
   a. PEREKONOMIAN TERENCANA YANG TERDIRI DARI KOMUNIS DAN SOSIALIS DIMANA PEMERINTAH YANG DIHARUSKAN MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN SELURUH FAKTOR PRODUKSI. SISTEM INI DIGUNAKAN OLEH NEGARA UNI SOVIET DAN EROPA HINGGA AKHIR ABAD 20 DAN YANG MASIH MENGGUNKAN SAMPAI SEKARANG ADALAH NEGARA KUBA, KOREA, VIETNAM DAN RRC DICETUSKAN OLEH KAL MAR
   b. PEREKONOMIAN PASAR YANG TERDIRI DARI KAPITALIS DAN PERUSHAAN SWASTA DIMANA PASAR YANG MENENTUKAN MEKANISME PERMINTAAN DAN PENAWARA
   c. PEREKONOMIAN PASAR CAMPURAN YAITU GABUNGAN ANTARA TERENCANA DAN PASAR CAMPURAN. TIDAK ADA NEGARA YANG MEMAKAINYA TERMASUK AS YANG MENGANUT KEBEBASAN.

B. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1. SISTEM EKONOMI INDONESIA MEMILIKI CIRI KHAS YANG DAPAT DIBEDAKAN DENGAN SISTEM EKONOMI YANG BERKEMBANG KARENA PERBEDAAN LATAR BELAKANG SEJARAH, SOSIAL, KULTURAL, DAN KONDISI GEOGRAFIS.
2. MENURUT CATATAN SEJARAH DAN HASIL DISKUSI PARA AHLI DIKETAHUI BAHWA SISTEM EKONOMI INDONESIA ADALAH SISTEM EKONOMI PANCASILA KARENA DITURUNKAN DARI NILAI-NILAI PANCASILA, SESUAI YANG DIRUMUSKAN DALAM PASAL 33 UUD 1945. TOKOH YANG MERUMUSKANNYA ADALAH MUH. HATTA.

C. POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIPERLUKAN RUMUSAN-RUMUSAN KEBIJKAN ANTARA LAIN :

A. PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN EFESIENSI EKONOMI SECARA BERKELANJUTAN MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA & RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MENGHASILKAN YG KOMPETITIF.

B. IMPLEMENTASI TATA RUANG WILAYAH SECARA KONSISTEN TERUTAMA PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

C. PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN NASIONAL MELALUI PENGEMBANGAN PANGAN NON BERAS UNTUK MENINGKATKAN ALTERNATIF PANGAN RAKYAT MENUJU SWASEMBADA PANGAN

1. SISTEM EKONOMI TRADISIONAL

- SISTEM EKONOMI INI MERUPAKAN SISTEM EKONOMI YANG DIJALANKAN SECARA BERSAMA UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA (DEMOKRATIS), SESUAI DENGAN TATA CARA YANG BIASA DITEMPUH OLEH NENEK MOYANG SEBELUMNYA
- DALAM SISTEM EKONOMI TRADISIONAL, TUGAS PEMERINTAH HANYA TERBATAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM BENTUK PERTAHANAN, DAN MENJAGA KETERTIBAN UMUM. DENGAN KATA LAIN KEGIATAN EKONOMI YAITU MASALAH APA DAN BERAPA, BAGAIMANA DAN UNTUK SIAPA BARANG DIPRODUKSI SEMUANYA DIATUR OLEH MASYARAKAT. PADA UMUMNYA, SISTEM PEREKONOMIAN INI BERLAKU PADA NEGARA-NEGARA YANG BELUM MAJU, DAN MULAI DITINGGALKAN. MISALNYA ETIOPIA DAN DI BEBERAPA DAERAH PELOSOK, SEPERTI SUKU BADUI DALAM, SISTEM INI MASIH DIGUNAKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI – HARI
- CIRI DARI SISTEM EKONOMI TRADISIONAL ADALAH :
  1. TEKNIK PRODUKSI DIPELAJARI SECARA TURUN TEMURUN DAN BERSIFAT SEDERHANA
  2. HANYA SEDIKIT MENGGUNAKAN MODAL
  3. PERTUKARAN DILAKUKAN DENGAN SISTEM BARTER (BARANG DENGAN BARANG)
  4. BELUM MENGENAL PEMBAGIAN KERJA
  5. MASIH TERIKAT TRADISI
  6. TANAH SEBAGAI TUMPUAN KEGIATAN PRODUKSI DAN SUMBER KEMAKMURAN
- SISTEM EKONOMI TRADISIONAL MEMILIKI KELEBIHAN SEBAGAI BERIKUT :
  1. TIDAK TERDAPAT PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT, HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU SANGAT ERAT
  2. MASYARAKAT MERASA SANGAT AMAN, KARENA TIDAK ADA BEBAN BERAT YANG HARUS DIPIKUL
  3. TIDAK INDIVIDUALISTIS
- KELEMAHAN DARI SISTEM EKONOMI TRADISIONAL ADALAH :
  1. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN MASIH SANGAT SEDERHANA, SEHINGGA PRODUKTIVITAS RENDAH
  2. MUTU BARANG HASIL PRODUKSI MASIH RENDAH

2. SISTEM EKONOMI LIBERAL

CIRI SISTEM EKONOMI LIBERAL :
A. HAK-HAK PRIBADI DIAKUI SECARA LUAS
B. SEBAGIAN BESAR MODAL DAN KEGIATAN EKONOMI DIKUASAI SWASTA
C. KEGIATAN EKONOMI DITENTUKAN OLEH MEKANISME PASAR

KEBAIKAN SISTEM EKONOMI LIBERAL :
- TERDAPAT KEBEBASAN YANG SANGAT LUAS
- KREATIVITAS MASYARAKAT LEBIH BERKEMBANG
- LEBIH EFISIEN MEMECAHKAN MASALAH EKONOMI

KEBURUKAN SISTEM EKONOMI LIBERAL :
- BISA MENGARAH KE MONOPOLI
- PERSAINGAN MENDORONG ORANG UNTUK MELAKUKAN SEGALA CARA
- PERUSAHAAN YANG TIDAK EFISIEN BISA TERSINGKIR DARI PASAR
- MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PRIBADI
- KURANG MEMPERHATIKAN PEMERATAAN

3. SISTEM EKONOMI KOMANDO

CIRI SISTEM EKONOMI KOMANDO :
A. SEMUA SUMBER DAYA MILIK PEMERINTAH
B. KEGIATAN EKONOMI DIATUR DAN DIAWASI PEMERINTAH

KEBAIKAN SISTEM EKONOMI KOMANDO :
- ADANYA JAMINAN PEKERJAAN BAGI SEMUA ORANG
- TINGKAT PEMERATAAN EKONOMI TINGGI
- HARGA BARANG STABIL

KEBURUKAN SISTEM EKONOMI KOMANDO :
- TIDAK TERDAPAT KEBEBASAN BAGI PELAKU-PELAKU EKONOMI
- HAK MILIK PERORANGAN TIDAK DIAKUI
- INISIATIF DAN KREATIVITAS RAKYAT SERING TERHAMBAT
- PEREKONOMIAN SERING BERJALAN TIDAK EFISIEN

4. SISTEM EKONOMI CAMPURAN

SISTEM EKONOMI CAMPURAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENGHINDARI KELEMAHAN-KELEMAHAN DARI SISTEM EKONOMI LIBERAL DAN SISTEM EKONOMI KOMANDO, SEHINGGA KEDUANYA DIGUNAKAN SECARA BERSAMAAN.

CIRI SISTEM EKONOMI CAMPURAN :

A. KEGIATAN EKONOMI SEBAGIAN DILAKUKAN OLEH SWASTA, SEBAGIAN OLEH PEMERINTAH

B. PIHAK SWASTA MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK MELAKSANAKAN AKTIVITAS EKONOMI, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM PEREKONOMI YANG DIANUT INDONESIA TERMASUK KEDALAM SISTEM PEREKONOMIAN CAMPURAN.

- SISTEM EKONOMI YANG DIKEMBANGKAN ADALAH **SISTEM EKONOMI KERAKYATAN** YANG BERTUMPU PADA MEKANISME PASAR YANG BERKEADILAN. SISTEM INI MEMUNGKIKAN SELURUH POTENSI MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEREKONOMIAN.
- PRIORITAS UTAMA YANG DIKEMBANGKAN ADALAH PENEGAKAN PRINSIP KEADILAN, PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG SEHAT, SERTA PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP YANG LEMAH
- **CIRI NEGATIF SISTEM EKONOMI YANG HARUS DIHINDARI, YAITU:**
  - SISTEM PERSAINGAN BEBAS TAK TERBATAS (FREE FIGHT LIBERALISME)
  - SISTEM ETATISME

BAB 4

PERANAN LEMBAGA PELAKU EKONOMI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SENDI UTAMANYA ADALAH UUD 1945 PASAL 33 AYAT (1), (2), DAN (3). BENTUK USAHA YANG SESUAI DENGAN AYAT (1) ADALAH KOPERASI, DAN BENTUK USAHA YANG SESUAI DENGAN AYAT (2) DAN (3) ADALAH PERUSAHAAN NEGARA.
- ADAPUN DALAM PENJELASAN PASAL 33 UUD 1945 YANG BERBUNYI "HANYA PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK BOLEH DI TANGAN SEORANG". HAL ITU BERARTI PERUSAHAAN SWASTA JUGA MEMPUNYAI ANDIL DI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.
- DENGAN DEMIKIAN TERDAPAT TIGA PELAKU UTAMA YANG MENJADI KEKUATAN SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA, YAITU PERUSAHAAN NEGARA (PEMERINTAH), PERUSAHAAN SWASTA, DAN KOPERASI. KETIGA PELAKU EKONOMI TERSEBUT AKAN MENJALANKAN KEGIATAN-KEGIATAN EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN.
- SEBUAH SISTEM EKONOMI AKAN BERJALAN DENGAN BAIK JIKA PELAKU-PELAKUNYA DAPAT SALING BEKERJA SAMA DENGAN BAIK PULA DALAM MENCAPAI TUJUANNYA. DENGAN DEMIKIAN SIKAP SALING MENDUKUNG DI ANTARA PELAKU EKONOMI SANGAT DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN.

- **PERAN SEAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI**
- **PERAN SEBAGAI PENCIPTA LAPANGAN KERJA**
- **FUNGSI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Siklus pelaku ekonomi

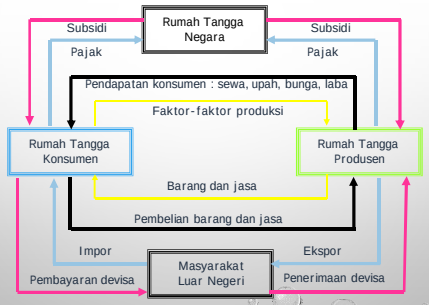

KEUNGGULAN KOMPARATIF PELAKU EKONOMI

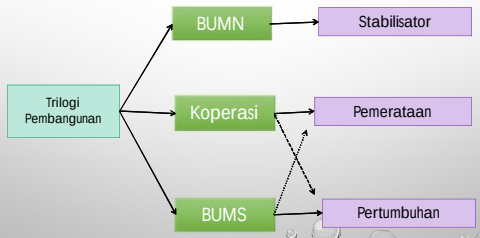

A.PELAKU-PELAKU EKONOMI

BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL / ASET

1. BUMN

Usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara / atau badan usaha statusnya disamakan dengan BUMN

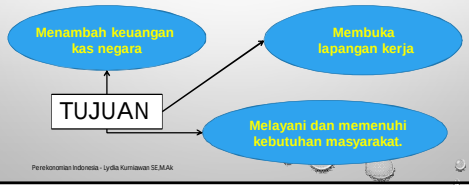

PERAN BUMN BAGI PEREKONOMIAN

- SEBAGAI PENGHASIL BARANG/JASA DEMI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK
- SEBAGAI PELOPOR DALAM SEKTOR-SEKTOR USAHA YANG BELUM DIMINATI SWASTA
- PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
- PEMBUKA LAPANGAN KERJA
- PENGHASIL DEVISA NEGARA
- PEMBANTU PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
- PENDORONG AKTIVITAS MASYARAKAT DI BERBAGAI LAPANGAN USAHA

CONTOH : PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGUASAI PRODUKSI PRIMER KEBUTUHAN MASYARAKAT, BBM, JASA TELEKOMUNIKASI, POS, PLN, PAM,BULOG.

2. BUMS

badan usaha yang didirikan dan dimiliki swasta secara individu atau kelompok.

PERAN BUMS BAGI PEREKONOMIAN

- KEUNTUNGAN YG DIPEROLEH AKAN DITANAMKAN KEMBALI UNTUK PERLUASAN USAHA (INVESTASI)
- SEMAKIN BESAR PRODUKSI

= PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA = PENINGKATAN PENDAPATAN

= MENIGKATKAN PERMINTAAN TERHADAP BARANG DAN JASA

= MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI & KEMAKMURAN MASYARAKAT

CONTOHNYA: PT. ASTRA INTERNATIONAL, PT. GOBEL DHARMA NUSANTARA (DALAM NEGERI), PT. FREEPORT INDONESIA COMPANY,

3. KOPERASI

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasar atas asas kekeluargaan

Bung Hatta berpendapat tujuan koperasi bukan mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

KOPERASI BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA
- SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN NASIONAL.
- SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL TATA PEREKONOMIAN NASIONAL

JENIS KOPERASI

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KREDIT)
KOPERASI KONSUMEN (PERTOKOAN)
KOPERASI PRODUSEN (PENGHASIL)
KOPERASI PEMASARAN (DISTRIBUSI)
KOPERASI JASA (LAYANAN)

A.PELAKU-PELAKU EKONOMI

BERDASARKAN BESAR-KECILNYA MODAL/ ASET :

1. Perusahaan Kecil / Usaha Skala Besar (USK)

total aset diluar tanah dan bangunan dibawah Rp 600 juta.
modal aktif di bawah Rp 25 juta
memiliki pekerja 5 – 19 orang

2. Perusahaan Menengah/ Usaha Skala Menengah (USM)

memiliki pekerja 20 – 99 orang
memiliki aset sampai dengan Rp 200 juta – Rp 500 juta

3. Perusahaan Besar/Usaha Skala Besar (USB)

UMKM

1. SEBAGAI KELOMPOK KECIL USAHA, UMKM SERINGKALI TERJEBAK PADA BEBERAPA PERMASALAHAN, DIANTARANYA :
- **A. KETERBATASAN MODAL.**
- **B. TEKNIK PRODUKSI**
- **C. PEMASARAN**
- **D. MANAJEMEN**
- **E. TEKNOLOGI**

2. CIRI-CIRI SPESIFIK UMKM SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI, DIANTARANYA SEBAGAI BERIKUT :
- **A. STRUKTUR ORGANISASINYA SANGAT SEDERHANA.**
- **B. MEMPUNYAI KARAKTER YANG KHAS**
- **C. TANPA STAF YANG BERLEBIHAN.**
- **D. PEMBAGIAN KERJA YANG LENTUR**
- **E. MEMILIKI HIERARKI MANAJEMEN YANG KECIL**
- **F. SEDIKIT AKTIFITAS YANG DIFORMALKAN**
- **G. SANGAT SEDIKIT YANG MENGGUNAKAN PROSES PERENCANAAN.**
- **H. JARANG MELAKUKAN PELATIHAN TERHADAP KARYAWAN**
- **I. JUMLAH KARYAWANNYA SEDIKIT**
- **J. PENGUSAHA SANGAT SULIT MEMBEDAKAN MANA ASET PRIBADI DAN ASET PRUSAHAAN.**
- **K. SISTEM AKUNTANSINYA KURANG BAIK (BAHKAN BIASANYA TIDAK DIMILIKI).**

PROFIL & PERAN UMKM DI INDONESIA

1. FUNGSI DAN PERANAN UMKM SAAT INI DIRASAKAN SEGITU PENTING, KARENA SEKTOR INI BUKAN SAJA SEBAGAI SUMBER MATA PENCARIAN ORANG BANYAK, TETAPI JUGA MAMPU MENYEDIAKAN SECARA LANGSUNG TENAGA KERJA BAGI MEREKA YANG TINGKAT PENGETAHUAN DAN KETERAMPILANNYA RENDAH.

2. DENGAN MENCERMATI BATASAN AKTIVITAS UMKM SECARA MENDALAM, SETIDAKNYA PROFIL PERAN DAN KONDISI UMKM DI INDONESIA BISA DI ILUSTRASIKAN SEBAGAI BERIKUT :

A. DARI SEKITAR 40 JUTA PELAKU USAHA INDONESIA 39 JUTA DI ANTARANYA MERUPAKAN USAHA MIKRO, 460 RIBU UNIT USAHA KECIL, 70 RIBU USAHA MENENGAH DAN 11 RIBU USAHA BESAR. DIANTARA USAHA MIKRO TERSEBUT 93% DIANTARANYA MERUPAKAN USAHA TANI & USAHA LAIN YG TERKAIT DENGAN PERTANIAN, TERMASUK PETANI PENYAKAP DAN PENYEWA .

B. DARI SISI PENYERAPAN TENAGA KERJA , UMKM DAPAT MENYEDIAKAN 97% KESEMPATAN KERJA, TERKAIT DGN DISTRIBUSI BARANG MENCAPAI 70% DAN MERUPAKAN PRODUSEN DARI 65% PRODUKSI BARANG DAN JASA YANG DITERIMA MASYARAKAT.

C. ADA KETIMPANGAN DARI SISI DISTRIBUSI ASET PRODUKTIF (FORMAL) SEKITAR 65% DIKUASAI OLEH 1% PELAKU USAHA TERBESAR

D. SECARA INTERNAL UMKM LEBIH BANYAK MENGHADAPI BERBAGAI KETERBATASAN DARIPADA MASALAH

BAB 5
SEKTOR – SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA

STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

ISTILAH STRUKTUR DIPAKAI UNTUK MENUNJUKKAN SUSUNAN ATAU KOMPOSISI DARI SESUATU. STRUKTUR EKONOMI DIPERGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN KOMPOSISI ATAU SUSUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DALAM SUATU PEREKONOMIAN. SEKTOR YANG DOMINAN ATAU YANG DIANDALKAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN PALING ATAS DALAM STRUKTUR TERSEBUT DAN MENJADI CIRI KHAS DARI SUATU PEREKONOMIAN.

YANG DIMAKSUD DENGAN SEKTOR EKONOMI YANG DOMINAN ATAU YANG DIANDALKAN ADALAH SEKTOR EKONOMI YANG MENJADI SUMBER MATA PENCAHARIAN SEBAGIAN TERBESAR PENDUDUK SERTA MENJADI PENYERAP TENAGA KERJA YANG TERBESAR. SEKTOR EKONOMI YANG DOMINAN ATAU ANDAL DAPAT JUGA BERARTI SEKTOR YANG MEMBERIKAN SUMBANGAN TERBESAR TERHADAP PRODUK NASIONAL DENGAN LAJU PERTUMBUHAN YANG TINGGI, YANG MENJADI CIRI KHAS DARI SUATU PEREKONOMIAN.

DIKENAL DUA MACAM STRUKTUR EKONOMI, YAITU:

(1) STRUKTUR AGRARIS, ADALAH STRUKTUR EKONOMI DIDOMINASI OLEH SEKTOR PERTANIAN. SEKTOR PERTANIAN MENJADI SUMBER MATA PENCAHARIAN SEBAGIAN TERBESAR PENDUDUKNYA. PADA UMUMNYA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG *(DEVELOPING COUNTRIES)* TERMASUK INDONESIA DI SEBUT NEGARA AGRARIS DAN NEGARA-NEGARA YANG TERMASUK NEGARA-NEGARA BELUM BERKEMBANG *(UNDER DEVELOPED COUNTRIES)* YANG PERTANIANNYA MASIH SANGAT TRADISIONAL DIKATEGORIKAN NEGARA AGRARIS TRADISIONAL.

(2) INDUSTRI, DIMANA STRUKTUR EKONOMI DIDOMINASI OLEH SEKTOR INDUSTRI. SEBAGIAN TERBESAR PRODUK DOMESTIK DISUMBANGKAN DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGAL DISUMBANGKAN OLEH SEKTOR INDUSTRI. NEGARA-NEGARA AMERIKA SERIKAT, JERMAN, INGGRIS, PERANCIS, ITALIA, JEPANG DAN KANADA YANG TERMASUK NEGARA INDUSTRI MAJU NEGARA-NEGARA EROPA DAN NEGARA-NEGARA LAINNYA TERMASUK NEGARA INDUSTRI.

PEREKONOMIAN DI INDONESIA DIPENGARUHI OLEH BERBAGAI BIDANG, BIASANYA BIDANG – BIDANG TERSEBUT BERDASARKAN LETAK GEOGRAFIS PULAU – PULAU DI INDONESIA. ADAPUN BIDANG – BIDANG TERSEBUT ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

1. **SEKTOR PERTANIAN DAN PERTERNAKAN.**

INDONESIA MERUPAKAN NEGARA AGRARIS, SEHINGGA SEBAGIAN BESAR RAKYAT INDONESIA BERMATA PENCARIAN SEBAGAI PETANI DAN PETERNAK. ADAPUN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

- KONTRIBUSI PRODUK : PERTANIAN JUGA BERPERAN SEBAGAI PENYUPLAI BAHAN BAKU YANG NANTINYA AKAN DIOLAH OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR.
- KONTRIBUSI PASAR : DENGAN ADANYA PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAPAT DIBENTUK SEBUAH SISTEM PASAR BEBAS YANG DI DALAMNYA TERJADI BERBAGAI PERTUKARAN KEBUTUHAN POKOK DENGAN UANG
- KONTRIBUSI DEVISA : PERTANIAN DAN PETERNAKAN MAMPU MEMBERIKAN DEVISA KEPADA NEGARA APABILA PERTANIAN DAN PETERNAKAN MAMPU MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI DAN MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN ATAUPUN PETERNAKAN.

2. **SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**

- PANDANGAN POSITIF TERHADAP SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN :
  - MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN UNTUK WARGA INDONESIA.
  - MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA.
  - MENAMBAH PARA PENAMBANG DAN PENELITI YANG DATANG KE INDONESIA, KARENA BANYAK DI TEMUKANNYA MATERIAL – MATERIAL PERTAMBANGAN.
  - MEMBUKA LAHAN INVESTASI YANG NANTINYA AKAN DIJADIKAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA.
- PANDANGAN NEGATIF TERHADAP PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN.
  - EKPLOITASI YANG BERLEBIHAN DAPAT MERUSAK KESIMBANGAN EKOSISTEM LINGKUNGAN.
  - MENYISAKAN AMPAS – AMPAS PERTAMBANGAN YANG AKAN MENCEMARI ALAM.
  - KETIDAKMAMPUAN PEMERINTAH DALAM MENYIKAPI PERUSAHAAN ASING YANG MENANAMKAN MODALNYA DI INDONESIA. SEHARUSNYA PEMERINTAH MEMPUNYAI BATASAN QUOTA YANG TEGAS KEPADA PERUSAHAAN ASING AGAR TIDAK MERUGIKAN PENDUDUK INDONESIA.

3. **SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**

- PANDANGAN POSITIF MENGENAI SEKTOR INDUSTRI :
  - MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN SEHINGGA MENGURANGI PENGANGGURAN DI INDONESIA, KHUSUSNYA DI IBU KOTA.
  - MENIGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS KARENA BIDANG INDUSTRI MEMBUTUHKAN PENGETAHUAN – PENGETAHUAN MENGENAI PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN INDUSTRI.
  - DAPAT BERSAING DENGAN NEGARA LUAR DENGAN MENINGKATKAN KUAITAS OUPTUT INDUSTRI.
- PANDANGAN NEGATIF TERHADAP SEKTOR INDUSTRI :
  - DIPERLUKANNYA KEMAMPUAN UNTUK PENINGKATAN PEMIKIRAN TENTANG INDUSTRI.
  - DIBUTUHKANNYA MODAL YANG SANGAT BESAR DALAM MENCIPTAKAN SUATU INDUSTRI

4. **SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN**

- SEPERTI YANG KITA LIHAT SEKARANG, DI SETIAP DAERAH YANG ADA DI INDONESIA MEMILIKI HOTEL DAN RETORAN ATAU RUMAH MAKAN. DAN TIDAK DAPAT DI RAGUKAN LAGI, SEBAGIAN BESAR YANG MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN DI INDONESIA ADALAH KEGIATAN PERDAGANGAN, NAMUN TINGKAT KONSUMSI DI INDONESIA JUGA CUKUP BESAR.
- PANDANGAN POSITIF TERHADAP SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN.
  - MEMBUKA LAPANGAN KERJA BARU BAGI WARGA INDONESIA.
  - MENINGKATKAN KERJASAMA TERHADAP WARGA ASING UNTUK PENAMBAHAN PELATIHAN KEMAMPUAN DI BIDANG TERSEBUT.
  - MENAMBAH PENDAPATAN NASIONAL NEGARA
  - MENCIPTAKAN INOVASI-INOVASI TERBARU DI BIDANG HOTEL DAN RESTORAN MAUPUN PERDAGANGAN.
- PANDANGAN NEGATIF TERHADAP SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN.
  - KARENA KURANGNYA PEMIKKIRANN DAN PERHITUNGAN YANG MATANG SEHINGGA BANYAK USAHA PERDAGANGAN, HOTEL MAUPUN RESTORAN NEGERI KALAH SAING DENGAN USAHA ASING YANG DI TANAMKAN DI INDONESIA.

o UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN
  - MEMBUTUHKAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DI BIDANG TERSEBUT.
  - MAMPU MELIHAT PELUANG – PELUANG YANG ADA SEHINGGA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN.
  - MEMPERSIAPKAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG BAGI SEKTOR LAIN YANG AKAN MENYERAP PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDONESIA.
  - PEMERINTAH BERPERAN DALAM MEMPROMOSIKAN SEKTOR – SEKTOR YANG ADA DI DALAM NEGERI, SEHINGGA PARA KONSUMEN LEBIH MEMILIH USAHA DI DALAM NEGERI.

5. **SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI**

- SEKTOR YANG MUNGKIN AKAN MEMBERIKAN DAMPAK CUKUP BAIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ADALAH TRANSPORTASI. HAL INI TERLIHAT DARI TERUS MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR JASA ANGKUTAN UDARA, DARAT, DAN LAUT YANG TERKAIT DENGAN ARUS DISTRIBUSI BARANG ANTARWILAYAH.
- SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI MENJADI FAKTOR UTAMA PERLUASAN GLOBALISASI. HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN BANYAKNYA DIBENTUK PERUSAHAAN DI BIDANG KOMUNIKASI. INDONESIAPUN BANYAK MENGAHASILKAN PERUSAHAAN – PERUSAHAAN DI BIDANG KOMUNIKASI, SEPERTI TELEPON, PROGRAM TELEVISI, IKLAN ATAUPUN INTERNET.
- PANDANGAN POSITIF TERHADAP PERUSAHAAN KOMUNIKASI
  - MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA GLOBAL DENGAN MENGETAHUI INFORMASI-INFORMASI DARI LUAR.
  - MENINGKATKAN KUALITAS INTELEGENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG IPTEK.
  - MEMBUKA LAPANGAN PEKERJA UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN.
  - MENCIPTAKAN PERSAINGAN YANG BERUNSUR PENGETAHUAN DAN TEKNOLGI.
  - SEMAKIN MUDAH MENCARI INFORMASI – INFORMASI YANG TERSEBAR DI PELOSOK DUNIA.
  - MENAMBAH PENDAPATAN NEGARA.
- PANDANGAN NEGATIF TERHADAP PERUSAHAAN KOMUNIKASI.
  - BANYAK ORANG YANG MENGGUNAKAN INFORMASI UNTUK SESUATU YANG MERUGIKAN ORANG LAIN, SEPERTI PENIPUAN, PEMBOBOLAN DATA DAN LAIN-LAIN.
  - BANYAK INFORMASI YANG TIDAK BERMORAL YANG TERSEBAR, NAMUN PERUSAHAAN KOMUNIKASI TIDAK MENYARING INFORMASI – INFORMASI TERSEBUT.

6. **SEKTOR JASA**

- TIDAK HANYA BARANG YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN NAMUN JASA ATAU KEMAMPUAN PUN DAPAT DIPERJUAL BELIKAN MISALNYA SEPERTI, PERUSAHAAN ASURANSI, TRAVEL, AKUNTAN PUBLIK, GURU, DAN MASIH BANYAK LAGI.
- PANDANGAN POSITIF TERHADAP SEKTOR JASA
  - MAMPU MENINGKATKAN KULITAS SDM INDONESIA.
  - BANYAKNYA USAHA – USAHA DI BIDANG JASA SEHINGGA MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN.
  - MEMPERMUDAH KEGIATAN MANUSIA
  - MENAMBAH PENDAPATAN NEGARA
  - BANYAK MEMBUTUHKAN TENAGA KERJA MANUSIA SEHINGGA MENGURANGI PENGANGGURAN.
- PANDANGAN NEGATIF TERHADAP SEKTOR JASA :
  - MANUSIA MENJADI SALING BERSAING MELAKUKAN SEGALA CARA UNTUK MENDAPAT POSISI TERBAIK.
  - MEMBUAT MANUSIA MALAS BERUSAHA KARENA ADANYA KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN OLEH PEUSAHAAN JASA.

7. SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

- SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH YANG MERUPAKAN SEKTOR PENUNJANG SELURUH KEGIATAN EKONOMI, DAN SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDORONG AKTIVITAS SELURUH SEKTOR KEGIATAN INDUSTRI, TERNYATA PERKEMBANGANNYA CUKUP PESAT. HAMPIR SELURUH KEGIATAN DI SEKTOR LISTRIK DAN AIR BERSIH DIMONOPOLI OLEH PEMERINTAH, SEHINGGA SEKTOR INI BISA BEBAS DARI PERSAINGAN BISNIS APAPUN.

8. SEKTOR KONTRUKSI

- Hadirnya perusahaan-perusahaan industri pada sektor konstruksi akhir-akhir ini mengalami peningkatan . Menurut BPS Pada 2010, tercatat sektor konstruksi memberi kontribusi sebesar Rp 86.513.410.000 atau 0,45 % dari total PDRB berdasar harga berlaku (IDHB). Tahun berikutnya sektor ini menyumbang Rp 110.689.580.000 atau 0,52 % pada PDRB IDHB. Hal ini tidak terlepas dari sektor Real estate yang semakin bertambah banyak

9. SEKTOR KEUANGAN & REAL ESTAT

- BEBERAPA SEKTOR EKONOMI YANG MENGALAMI PERTUMBUHAN ADALAH ADALAH SEKTOR KEUANGAN, REAL ESTATE, DAN JASA PERUSAHAAN. **SEKTOR PROPERTI INDONESIA** MENCATAT PERTUMBUHAN 7.56% DI TAHUN 2013, CUKUP JAUH DIATAS SEKTOR-SEKTOR LAINNYA. PERTUMBUHAN INI MENANDAI MENINGKATNYA PERAN SEKTOR TERSEBUT DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI.
- DENGAN BERANEKA ISU TERSEBUT, SEKTOR PROPERTI INDONESIA TAHUN 2014 MENGALAMI PERTUMBUHAN YANG BERAGAM. REAL ESTATE DI PULAU JAWA NAMPAKNYA TELAH MENGALAMI KEJENUHAN DI SISI SUPLAI. NAMUN DEMIKIAN, PERKEMBANGAN GOLONGAN EKONOMI MENENGAH AKAN MENDORONG DEMAND DI SEKTOR INI, KHUSUSNYA UNTUK APARTEMEN. SEDANGKAN DI LUAR JAWA, KEBUTUHAN PERUMAHAN MASIH JAUH DARI TERPENUHI, DAN INI MERUPAKAN KESEMPATAN BAGI PARA PENGEMBANG.

10. SEKTOR INFORMAL

- PERMASALAHAN SEKTOR INFORMAL YANG TERJADI SEAKAN-AKAN MENJADI SUATU PERMASALAHAN RUTIN DI MASYARAKAT, SEPERTI PERPUTARAN SIKLUS, TIDAK PERNAH BERHENTI MESKIPUN SECARA TEORITIS SEKTOR INI BUKANLAH SUATU FENOMENA YANG BARU. SEKTOR INFORMAL ADA DI SEKELILING KITA SEJAK MANUSIA ADA DI MUKA BUMI. KARENA SEKTOR INI MUNCUL SEJAK MANUSIA ADA DI MUKA BUMI, MAKA MEREKA MELAKUKAN KEGIATAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA DENGAN CARA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA SENDIRI ATAU *SELF EMPLOYED*. AKAN TETAPI, SEKTOR INFORMAL SELALU MENDAPATKAN PREDIKAT SEBAGAI "PENGHAMBAT" PEMBANGUNAN. PREDIKAT TERSEBUT SELALU SAJA MENJAI PERMASALAHAN YANG KIAN HARI KIAN SEMPIT RUANG GERAKNYA. AKIBATNYA, SEKTOR INFORMAL SEMAKIN SULIT UNTUK MENGEMBANGKAN USAHANYA DEMI MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP.
- PERSPEKTIF INFORMALITAS YANG TERJADI DI PERKOTAAN SENDIRI DICERMATI DALAM FENOMENA PKL (PEDAGANG KAKI LIMA) YANG KERAP KALI DIPANDANG DARI SISI NEGATIF. PKL SENDIRI BUKANLAH SUATU KELOMPOK YANG GAGAL MASUK DALAM SISTEM EKONOMI PERKOTAAN. MEREKA BUKANLAH KOMPONEN EKONOMI PERKOTAAN YANG MENJADI BEBAN BAGI PERKEMBANGAN PERKOTAAN. PKL ADALAH SALAH SATU MODAL DALAM TRANSFORMASI PERKOTAAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM EKONOMI PERKOTAAN.

11. SEKTOR LUAR NEGERI

- HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL ADALAH HUBUNGAN EKONOMI ANTARA SATU NEGARA DENGAN NEGARA LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI ALOKASI SUMBER DAYA BAIK ANTARA DUA NEGARA TERSEBUT MAUPUN ANTAR BEBERAPA NEGARA.
- HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DAPAT BERUPA PERDAGANGAN, INVESTASI, PINJAMAN, BANTUAN SERTA KERJASAMA INTERNASIONAL. PARA PELAKU YANG MENGADAKAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL MELIPUTI SWASTA, PEMERINTAH MAUPUN ORGANISASI INTERNASIONAL.
- HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL BERBEDA DENGAN HUBUNGAN ANTAR REGIONAL (YAITU HUBUNGAN DIANTARA BERBAGAI WILAYAH NEGARA YANG SAMA), SEHINGGA MEMERLUKAN PERALATAN ANALISIS YANG SEDIKIT BERBEDA DAN MENGANGGAP EKONOMI INTERNASIONAL SEBAGAI BAGIAN YANG BERBEDA DARI ILMU EKONOMI.
- HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL ITU MEMPUNYAI CIRI- CIRI YANG KHUSUS DIBANDING DENGAN HUBUNGAN INTERREGIONAL. HUBUNGAN KHUSUS TERSEBUT YAITU :

  A. MOBILITAS FAKTOR SEPERTI TENAGA KERJA DAN MODAL RELATIVE LEBIH SUKAR

  B. SISTEM KEUANGAN, PERBANKAN, BAHASA, KEBUDAYAAN DAN POLITIK YANG BERBEDA.

  C. FAKTOR PRODUKSI YANG DIMILIKI BERBEDA SEHINGGA MENIMBULKAN PERBEDAAN HARGA BARANG YANG DIBERIKAN.

BAB 6
POTENSI – POTENSI EKONOMI DI INDONESIA

- EKONOMI MERUPAKAN ILMU YANG SANGAT PENTING DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, KARENA PADA KEHIDUPAN SEHARI-HARI EKONOMI SANGAT KITA PERLUKAN, CONTOHNYA SAAT KITA MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL-BELI BARANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARI MENJADI CONTOH SALAH SATU KEGIATAN DALAM BENTUK EKONOMI SEHARI-HARI. EKONOMI ADALAH SEBAGAI PENGUKUR TINGKAT KEMAJUAN SUATU NEGARA, APAKAH NEGARA TERSEBUT EKONOMI -NYA DAPAT BERKEMBANG DENGAN BAIK ATAU KEADAAN EKONOMI -NYA SEMAKIN MEMBURUK.
- POTENSI DALAM KEGIATAN BIDANG EKONOMI BERARTI MEMILIKI ARTI PENGERTIAN SESUATU YG DAPAT DIKEMBANGKAN ATAU DAPAT DITINGKATKAN PEMANFAATAN NILAINYA. JIKA KATA INI DIKAITKAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM, MAKA BERARTI MENGGALI NILAI MANFAAT SDA YG LEBIH MENGARAH KEPADA KEGIATAN BENTUK EKONOMI. SEBAGAI CONTOHNYA POTENSI DALAM KEGIATAN BENTUK EKONOMI SUMBER DAYA PERAIRAN, BERARTI KATA POTENSI DISINI MEMILIKI ARTI BAHWA KITA BERUSAHA MENINGKATKAN ATAU MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA PERAIRAN AGAR MEMILIKI NILAI GUNA PADA BIDANG EKONOMI.

1. KEGIATAN EKONOMI

- KEGIATAN DALAM EKONOMI MERUPAKAN KEGIATAN DIMANA BERTUJUAN MENGHASILKAN BARANG & JASA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP DAN DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI TIGA MACAM KEGIATAN. MACAM KEGIATAN DALAM EKONOMI, YAITU:

  PRODUKSI : USAHA MANUSIA UNTUK MENGHASILKAN ATAU MENGUBAH BARANG ATAU JASA MENJADI BERNILAI LEBIH TINGGI

  DISTRIBUSI : KEGIATAN DARI EKONOMI UNTUK MENYALURKAN BARANG / JASA DARI PRODUSEN KEPADA KONSUMEN

  KONSUMSI : AKTIVITAS DIMANA BERSIFAT MENGURANGI, ATAU MENGHABISKAN MANFAAT & KEGUNAAN HASIL DARI PRODUKSI (BARANG ATAU JASA) UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN.

2. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

- PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM TELAH DILAKUKAN DALAM BERBAGAI BENTUK KEGIATAN DAN DISESUAIKAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM YANG DIMILIKI. KEGIATAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN RODA EKONOMI INI DAPAT DIBAGI KE DALAM BEBERAPA BENTUK, ANTARA LAIN :

  AKTIVITAS KEGIATAN PERTANIAN, **AKTIVITAS KEGIATAN PERTAMBANGAN,**

  AKTIVITAS KEGIATAN PERKEBUNAN, **AKTIVITAS KEGIATAN PERIKANAN,**

  AKTIVITAS KEGIATAN PETERNAKAN, **AKTIVITAS KEGIATAN KEHUTANAN.**

- SUMBER DAYA ALAM ADALAH SEMUA BAHAN YANG DITEMUKAN MANUSIA DALAM ALAM & DAPAT DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN HIDUPNYA ATAU UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI SEHARI-HARI. SUMBER DAYA ALAM DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI BERBAGAI GOLONGAN BERDASARKAN KEMUNGKINAN PEMULIHAN, MATERI, & MACAM HABITATNYA.

3. POTENSI DI INDONESIA

- INDONESIA MERUPAKAN NEGARA WILAYAH SANGAT LUAS & KAYA. INDONESIA TIDAK HANYA MEMILIKI KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM MELIMPAH, TETAPI JUGA **KEBUDAYAAN** BERANEKA RAGAM. DARI **SEGI GEOGRAFIS**, NEGERI INDONESIA KITA INI MEMILIKI WILAYAH LAUT TERLUAS (5,8 JUTA KM2) & JUMLAH PULAU TERBANYAK (17.508 PULAU).
- INDONESIA MEMILIKI KEKAYAAN ALAM YG SANGAT BERLIMPAH. KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA TIDAK HANYA BERUPA BAHAN TAMBANG, TETAPI JUGA **HUTAN**, AIR, TANAH YG SUBUR & LAUT YG LUAS.

CONTOH PEMANFAATAN SDA DI INDONESIA

1. BIDANG PERTANIAN
2. BIDANG PERKEBUNAN
3. BIDANG PERIKANAN
4. BIDANG PETERNAKAN
5. BIDANG KEHUTANAN
6. SUMBER DAYA MANUSIA
7. INVESTASI

DINAMIKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUATU NEGARA SANGAT DITENTUKAN OLEH BANYAK FAKTOR, BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL.

- FAKTOR INTERNAL ANTARA LAIN : KONDISI FISIK (TERMASUK IKLIM), LOKASI GEOGRAFI, JUMLAH DAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM (SDA), DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
- FAKTOR EKSTERNAL ANTARA LAIN : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, KONDISI PEREKONOMIAN DAN POLITIK DUNIA, KEAMANAN GLOBAL

INDONESIA ADALAH NEGARA BESAR DENGAN POTENSI DAN PELUANG EKONOMI YANG MENJANJIKAN. INDONESIA MEMILIKI POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG BISA MENJADI PELUANG MEMAJUKAN PEREKONOMIAN. SETIDAKNYA ADA EMPAT SEKTOR POTENSIAL YANG AKAN MENOPANG LAJU PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA MENDATANG YAKNI PELAYANAN KONSUMEN ATAU JASA, PERTANIAN DAN PERIKANAN, SUMBER DAYA ALAM, SERTA PENDIDIKAN.

POTENSI YANG BESAR INI BISA MENJADI SUMBER PERTUMBUHAN PADA MASA DEPAN DENGAN DUKUNGAN PERANGKAT EKONOMI NASIONAL SEPERTI KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN FISKAL, MONETER, PERBANKAN SERTA POLITIK DAN ENERGI YANG DIARAHKAN PADA PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR TERSEBUT

Perekonomian indonesia

1

Materi uas

Struktur dan Perubahan struktur dalam Perekonomian Indonesia (PERANAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA) Bab 7 & 9

2

- Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan perubahan struktur perekonomian.
- Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor tradisional ke sektor modern. Perubahan struktur ekonomi tersebut adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri, baik dalam produk domestik bruto (PDB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kontribusi sektor industri, baik kontribusinya terhadap output maupun terhadap penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Semakin tinggi kontribusi sektor industri dalam perekonomian menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara semakin maju
- Pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu:
  (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

3

- Transisi ekonomi antarnegara pola dan prosesnya berbeda (Faktor Pendorong Industrialisasi)
  - Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
  - Besarnya pasar dalam negeri
  - Pola distribusi pendapatan
  - Karakteristik industrialisasi
  - Keberadaan SDA
  - Kebijakan perdagangan luar negeri
- Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan:
  (1) Merosotnya pangsa sektor primer (merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian),
  (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (merupakan gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air dan sektor konstruks), dan
  (3) pangsa sektor tersier (merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

4

- Industrialisasi adalah Suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur Ekonomi.
- Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi.
- Peranan Industri dalam PEREKONOMIAN
  a. Pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang
  b. Berperan penting dalam pembangunan nasional
  c. Sebagai mesin pembangunan
  d. memiliki beberapa keunggulan

5

- TEORI-TEORI MELANDASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI
  a. Teori Keunggulan Komparatif
  b. Teori Keterkaitan Industrial
  c. Teori Penciptaan Kesempatan Kerja
  d. Teori Loncatan Teknologi
- **POLA PENGEMBANGAN INDUSTRI**
  a. Pengembangan industri yang berorientasi pasar
  b. Pendalaman dan penguatan sektor industri
  c. Pengembangan industri kecil
  d. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
  e. Peningkatan penguasaan dan penyebaran teknologi
  f. Pengembangan langkah penunjang

6

- Strategi pembangunan ekonomi

Ada 2 macam strategi pembangunan ekonomi:

A. Outward looking policies (pembangunan ekonomi dengan ekspor sebagai motor penggerak utama - (promosi ekspor)
   - Primary outward-looking policies (pembanguan ekonomi didorong oleh pertumbuhan ekspor komoditas pertanian dan sektor primer lainnya)
   - Secondary outward-looking policies (pertumbuhan sektor industri terutama untuk promosi ekspor barang-barang manufaktur

B. Inward looking policies (pembangunan ekonomi dilandasi oleh pengembangan sektor-sektor domestik yang kuat) - (substitusi impor)
   - Primary inward-looking policies (pembangunan ekonomi dengan prioritas pada swasembada komoditas pertanian)
   - Secondary inward-looking policies (pembangunan ekonomi dengan prioritas pd swasembada barang-barang industri lewat kebijakan substitusi impor

KLASIFIKASI INDUSTRI DI INDONESIA

7

Di Indonesia industri digolongkan berdasarkan :
- kelompok komoditas
- skala usaha
- hubungan arus produknya

Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahan menjadi tiga subsektor yaitu :
-sub sektor industri pengolahan non migas
-sub sektor pengkilangan minyak bumi
-sub sektor penolahan GaS alam cair

Untuk keperluan pengembangan sektor industri sendiri (industrialisasi) serta berkaitan dengan administrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, industri di Indonesia berdasarkan hubungan arus produknya menjadi
- industri Hulu, terdiri atas : a. industri kimia dasar
  b. industri mesin, logam dasar dan elektronika
- industri Hilir, terdiri atas : a. aneka industri
  b. industri kecil

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecil nya skala usaha dilakukan beberapa lembaga dengan kriteria berbeda-beda, BPS membedakan skala industri menjadi empat lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha:
a. Industri Besar : Tenaga kerja 100 orang dan lebih
b. Industri Sedang : Tenaga kerja 20-99 orang
c. Industri Kecil : Tenaga kerja 5-19 orang
d. Industri Kerajinan Rumah tangga : Tenaga kerja 1-4 orang

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

8

- Dalam konteks ekonomi/perdagangan internasional pengertian daripada keunggulan relatif dapat didekati dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Suatu wilayah memiliki keunggulan bisa secara alami (natural advantages) atau yang dikembangkan (acquired advantages). Keunggulan alami yang dimiliki Indonesia adalah jumlah tenaga kerja, khususnya dari golongan berpendidikan rendah dan bahan baku yang berlimpah. Kondisi ini membuat upah tenaga kerja dan harga bahan baku di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan di negara-negara lain yang penduduknya sedikit dan miskin SDA. Sedangkan yang dimaksud dengan keunggulan yang dikembangkan adalah misalnya tenaga kerja yang walaupun jumlahnya sedikit memiliki pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan penguasaan teknologi sehingga mampu membuat bahan baku sintesis yang kualitasnya lebih baik daripada bahan baku asli, atau berproduksi secara lebih efisien dibandingkan negara lain yang kaya SDA.

- Inti daripada paradigma keunggulan kompetitif adalah bahwa keunggulan suatu negara atau industri di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya, yang diperkuat dengan proteksi atau bantuan dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya

BAB 8 - PERANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

9

A.PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

- Hubungan ekonomi internasional adalah hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara.
- Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi swasta, pemerintah maupun organisasi internasional.
- Hubungan ekonomi internasional itu mempunyai ciri- ciri yang khusus dibanding dengan hubungan interregional. Hubungan khusus tersebut yaitu :
  a. Mobilitas faktor seperti tenaga kerja dan modal relative lebih sukar
  b. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan dan politik yang berbeda.
  c. Faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga menimbulkan perbedaan harga barang yang diberikan.

Perdagangan Internasional

10

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal *(country of origin)* yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan *(country of destination)* yang dilakukan perusahaan multinasional untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal, tenaga kerja, teknologi dan perpindahan merek dagang.

Perdagangan internasional timbul karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah negara tersebut tidak bisa memproduksi semua barang kebutuhanan yang dibutuhkan oleh negara tersebut sendiri, perdagangan internasional juga timbul karena adanaya perbedaan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memproduksi barang kebutuhan pokok, biaya produksi terdiri dari upah, modal, sewa tanah, biaya bahan mentah, serta efisiensi dalam proses produksi. Untuk menghasilkan suatu barang produksi negara satu belum tentu sama ongkos biayanya dengan negara lain. Perbedaan inilah yang menjadi pangkal dari timbulnya perdagangan internasional.

11

Perdagangan internasional akan senantiasa menggunakan beberapa asumsi dasar yaitu:
a. *Neurtrality of Money*, dalam arti uang tidak berpengaruh atas harga relative.
b. Jumlah faktor produksi dari setiap negara.
c. Faktor produksi dari tiap negara tidak dapat berpindah (*international immobility of factors*).
d. Teknologi yang tidak sama
e. *Taste and income distribution* dianggap sebagai sesuatu yang *given* dan tidak berubah.
f. Tidak terdapat hambatan perdagangan (*trade barrier*) dalam bentuk biaya transport, informasi dan komunikasi.
g. Adanya *full employment* faktor produksi dan tidak terjadi *exess supplies* atau *shortage of commodities.*

Teori internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :
1. Teori praklasik merkantilisme,
2. teori klasik, Teori klasik yang dikenal denganteori keunggulan absolute oleh Adam Smith (1766) dan teori biaya relative oleh DavidRicardo (1817).
3. Teori modern.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional

12

1. **Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk dan dari kondisi ekonomi atau perdagangan internasional yang tidak menguntungkan**
2. **Melindungi kepentingan industri dalam negeri**
3. **Melindungi lapangan kerja (employment)**
4. **Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca perdagangan internasional**
5. **Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil**
6. **Menjaga stabilitas nilai tukar /kurs valas**

ANALISA KEBIJAKAN DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

13

a. Analisa Kebijakan Perdagangan

1. Peluang Dunia Usaha Dalam Era Globalisasi

•Tersebarnya pasar berskala lebih luas dan diversifikasi produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi.

•Tersedianya realokasi industri manufaktur dari Negara industri maju ke Negara berkembang dengan upah buruh yang lebih rendah.

Akibatnya siklus proses bahan baku sampai menjadi barang jadi lebih pendek, harga per unit turun dan akan meningkatkan volume penjualan.

Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia, meliputi :

•Sumber daya alam yang kaya

•Sumber daya manusia yang banyak, upah buruh murah

•Situasi politik dan keamanan yang stabil (awal 1990-an)

•Kebijakan ekonomi yang konsisten (awal 1990-an)

•Komponen ekonomi makro yang kuat (awal 1990-an)

14

2. Kebijakan Bisnis yang Dilakukan

- Menarik tenaga ahli yang berpengalaman internasional, yang dapat melakukan negosiasi dan mengerti hukum yang berlaku di Negara lain.
- Perlu diusahakan untuk membuka usaha baru dan mengisi peluang yang tersedia.
- Tantangan kompetensi dihadapi dengan peningkatan efisiensi, investasi modal yang makin besar untuk membentuk jaringan internasional dan peningkatan pertumbuhan prasarana ekonomi yang makin cepat.

3. Kebijakan dalam Era Globalisasi

Komponen dalam penyusunan strategi global

- Mengkaji perkembangan ekonomi dunia yang relevan dengan Indonesia, terutama ekonomi Amerika Erikat, Eropa Barat dan Jepang.
- Mengikuti prospek mata uang dollar AS, Euro Eropa dan Yen Jepang.
- Memonitor perkembangan politik dan keamanan dalam negeri serta arah kebijakan pembangunan pada umumnya.
- Memonitor perkembangan ekonomi keuangan Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional dan sektoral, APBN dan fiscal, N. Pembayaran terutama transaksi berjalan, JUB, inflasi, nilai tukar rupiah, likuiditas bank, tingkat suku bunga.
- Menetapkan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan beserta anggarannya.

MENGAPA PEMERINTAH MENERAPKAN HAMBATAN PERDAGANGAN ?

15

Banyak alasan yang mendorong pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan perdagangan, diantaranya adalah :

- Tarif dan Quota disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor luar negeri, di pergunakan untuk lebih menyimbangkan keadaan neraca pembayaran yang masih defisit. Dengan dikenakannya tarif atau quota pengeluaran untuk membeli komoditi import menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi pos pengeluaran dalam neraca pembayaran.
- Tarif dan Quota juga di terapkan untuk melindungi industri dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang dari serangan komoditi – komoditi asing yang telah lebih dahulu 'dewasa'. Dapat juga kebijaksanaan ini diterapkan jika suatu negara tidak memiliki persediaan devisa yang cukup untuk melakukan import sehinggapemerintah harus menghemat devisa tersebut.
- Tarif dan Quota juga diterapkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara. Berkembangnya industri di dalam negeri memberi dampak positif bagi banyak pihak seperti produsen, karyawannya termasuk konsumen.
- Adapun Dumping jika terpaksa ditempuh (sering kemudian menjadi masalah antar negara) digunakan untuk memacu perkembangan ekspor lewat kenaikan permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut.
- Sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan HAM, politik, terorisme dan keamanan Internasional. Bagi negara yang terkena sanksi diharapkan dapat memperbaiki 'sikap' dan 'tindakannya' bagi kepentingan negara lain dan bagi dunia.

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

16

Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerja sama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerja sama, yaitu:

Kerja sama bilateral

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerja sama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

Kerja sama regional

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerja sama regional antara lain:

- ASEAN
- Liga Arab

Kerja sama multilateral

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan beberapa negara. Contoh kerjasama ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB 10 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) & DAERAH (APBD)

17

DASAR HUKUM

- **UUD 1945**
- **PEMERINTAH PUSAT** (APBN)

  UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

  UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

  UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional

  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

  Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- **PEMERINTAH DAERAH** (APBD)

  UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  PP 58 2005, PERMENDAGRI 13 2006, PERMENDAGRI 59 2007, PERDA

PENGERTIAN

18

- Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk pula dalam hal pengurusan keuangan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
- Semua **penerimaan** yang menjadi hak dan **pengeluaran** yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN
- **Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember**.

FUNGSI APBN

19

- **Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.**
- **Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.**
- **Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.**
- **Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.**
- **Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**
- **Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.**

TAHAP/SIKLUS APBN (Sugijanto, Gunardi, dan Loho, 1995)

20

- Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU APBN) oleh pemerintah kepada DPR
- Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan penetapan UU APBN
- Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah
- Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional
- Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (APBN)

- Presiden
- Menteri Keuangan
- Menteri/Pimpinan Lembaga

STRUKTUR APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

- Pendapatan Negara
- Hibah

−

Belanja Negara

- Belanja Pemerintah Pusat
- Transfer ke Daerah

=

Surplus/Defisit Anggaran

Pembiayaan Defisit

21

KLASIFIKASI BELANJA DALAM APBN

22

MENURUT FUNGSI :

1. **Pelayanan Umum Pemerintahan;**
2. **Pertahanan;**
3. **Hukum, Ketertiban dan Keamanan;**
4. **Ekonomi;**
5. **Lingkungan Hidup;**
6. **Perumahan dan Pemukiman;**
7. **Kesehatan;**
8. **Pariwisata dan Budaya;**
9. **Agama;**
10. **Pendidikan;**
11. **Perlindungan Sosial.**

MENURUT JENIS :

1. **Belanja Pegawai;**
2. **Belanja Barang dan jasa;**
3. **Belanja Modal;**
4. **Bunga;**
5. **Subsidi;**
6. **Hibah;**
7. **Bantuan Sosial;**
8. **Belanja Lain-Lain.**

APBD

23

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

- Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
- Pembiayaan Daerah adalah semua kegiatan pemerintah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus

Struktur APBD

24

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- **PAD** mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- **Dana Perimbangan** mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** mencakup hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- Belanja Tidak Langsung
  Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- Belanja Langsung
  Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Struktur APBD

25

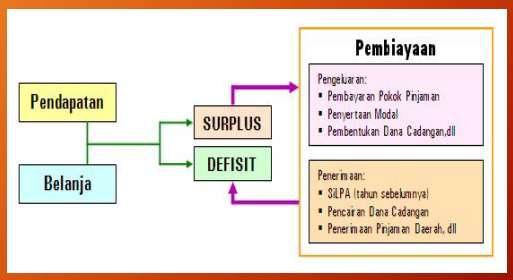

BAB 11 - PERANAN MONETER PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

26

- **Sistem Moneter Internasional** (SMI) menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat dimana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain (Shapiro, 1992).
- SMI sering diibaratkan jaringan lampu lalu lintas, di mana setiap pelaku menganggapnya tidak ada masalah kecuali lampu tersebut rusak atau mati (Rivera-Batiz, 1989)
- IMS meliputi: instrumen, lembaga, kesepakatan yang menghubungkan mata uang, pasar uang, sekuritas, real estate, dan pasar komoditas dunia.
- Tujuan IMS: untuk mendesain kurs tukar mata uang antar negara di dunia stabil.
- Kurs tukar valas: harga suatu mata uang negara lain yang dinilai dengan mata uang negara tertentu.
- Kurs Rp/US$: harga dollar yang dinilai dengan rupiah

Neraca Pembayaran & Kebijakan Moneter

27

28

Pos pos neraca pembayaran

Debit (-)Pembayaran	Kredit (+)Penerimaan
Transaksi berjalan 1.Impor barang 2.Penerimaan jasa 3.Bunga yang dibayar	Transaksi berjalan 1.Ekspor barang 2.Pemberian jasa 3.Bunga yang diterima
Lalu lintas modal 4.Kredit yang diberikan	Lalu lintas modal 4.Kredit yang diterima
Lalu lintas moneter 5.Pertambahan cadangan emas /devisa	Lalu lintas moneter 5.Pengurangan cadangan emas /devisa

Tujuan Penyajian Neraca Pembayaran

29

- **Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian**
  Ditentukan oleh besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk, dan sebaliknya. Semakin besar permintaan, semakin besar peranan ekspor terhadap PDB.
- **Mengetahui aliran sumber daya antar negara**
  Suatu negara sebagai pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan atau modal.
- **Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan**
  Pendapatan suatu negara bergantung dari hasil ekspor atau bergantung dari sumber pembiayaan investasi dari negara lain.
- **Mengetahui permasalahan utang luar negeri**
  Dari transaksi modal dan keuangan dapat diketahui kemampuan suatu negara memenuhi kewajibannya terhadap negara lain.
- **Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara dan potensi tekanan nilai tukar Rupiah**
  Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran dan pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan nilai tukar Rupiah.
- **Sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa**
  Melalui surplus atau defisit neraca pembayaran dalam tahun tertentu, dapat diperkirakan kebutuhan devisa untuk tahun berikutnya.
- **Sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional (*national account*)**
  Ekspor dan impor barang dan jasa dalam neraca pembayaran merupakan sumber data dalam perhitungan pendapatan nasional.

Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter

30

Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah serangkai an kebijakan ekonomi makro terbuka yg bertujuan utk mempengaruhi pengeluaran dan perubahan permintaan (expenditure and demand change policies)

Kebijakan Fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan yg berkaitan dgn perubahan pengeluaran pemerintah dan atau penerimaan pajak yg di Indonesia disebut Kebijakan APBN.

Kebijakan Moneter (monetary policy) adalah suatu kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rate) atau disebut juga ke bijakan pasar terbuka (open market policy)

Kebijakan Fiskal (fiscal policy)

31

Bersifat Ekspansif

1. Menaikan pengeluaran pemerintah
2. Menurunkan pajak dg tujuan :
   - ❑ Mendorong pertumbuhan produksi DN
   - ❑ Menaikan pendapatan masyarakat
   - ❑ Mendorong Impor

Bersifat Kontraktif

1. Menurunkan pengeluaran pemerintah
2. Menaikkan pajak dg tujuan :
   - ❑ Mengurangi produksi DN
   - ❑ Menurunkan pendapatan masyarakat
   - ❑ Menurunkan Impor

Kebijakan Moneter (monetary policy)

32

Bersifat Ekspansif (easy money policy)

1. Menambah jumlah uang beredar (Ms)
2. Menurunkan tk bunga dg tujuan :
   - ❑ Mendorong investasi
   - ❑ Menaikan penerimaan masyarakat
   - ❑ Mendorong Impor
   - ❑ Mendorong arus keluar dan menurunkan arus masuk modal jangka pendek

Bersifat Kontraktif (tight money policy)

1. Mengurangi jumlah uang beredar
2. Menaikkan tk bunga dg tujuan :
   - ❑ Memperkecil investasi
   - ❑ Menurunkan penerimaan masy
   - ❑ Menurunkan Impor
   - ❑ Mendorong arus masuk dan menurunkan arus keluar modal jangka pendek

Kebijakan Moneter di Indonesia

33

- ❖ Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro.
- ❖ Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (*social welfare*)

Kebijakan Moneter di Indonesia

Kerangka Operasi Kebijakan Moneter

34

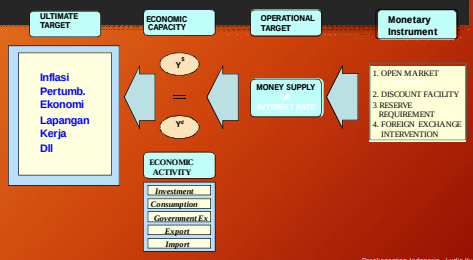

A. Inflasi

35

Definisi : proses kenaikan harga umum barang/jasa secara agregat dan terus-menerus.

Alat Mengukur inflasi:
1. Indeks biaya hidup (*consumer price index*)
2. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)
3. GNP deflator.

JENIS & PENYEBAB INFLASI

1. Demand-pull Inflation;
   Terdapat kenaikan permintaan total (*agregate demand*) sedangkan produksi telah berada pada keadaan full-employment. Penyebab: persepsi ttg kenaikan pendapatan, konsumerisme, persepsi tentang stok barang/jasa.
2. Cost-push inflation;
   Kenaikan harga disertai dengan turunnya produksi. Inflasi seperti ini biasanya disertai dengan resesi. Penyebab: perjuangan serikat buruh untuk kenaikan upah, monopoli oleh pengusaha besar, kenaikan harga bahan baku industri.

PENGARUH INFLASI
- Terhadap pendapatan: Menurunnya pendapatan riil bagi kelompok masy yg gaji/upahnya tetap. Keuntungan bagi mereka yg kenaikan pendapatannya lebih besar drpd laju inflasi.
- Terhadap efisiensi: dalam banyak kasus, inflasi menurunkan efisiensi alokasi faktor produksi.
- Terhadap output: Pada tahap tertentu, inflasi akan mendorong kenaikan produksi. Tetapi jika sudah terlalu tinggi (*hyper inflation*), yang terjadi adalah penurunan output.

36

B. Deflasi
Lawan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah keadaan perekonomian yang menunjukan turunnya harga barang-barang secara umum dan terus-menerus. Deflasi juga mengakibatkan para pengusaha sulit mengadakan Investasi (penanaman modal) yang berbentuk pendirian perusahaan, dan lain-lain karena sulit mendapatkan uang.

C. Devaluasi
Devaluasi adalah kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

D. Depresiasi
Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

E. Revaluasi
Revaluasi adalah kebijakan pemerintah menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

F. Apresiasi
Apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing yang terjadi karena kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing

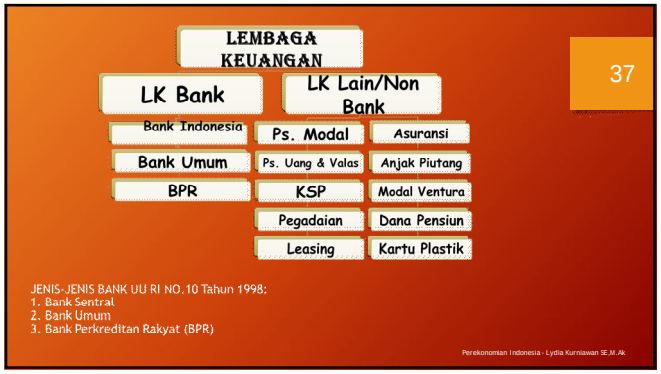

37

38

39

Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini digambarkan dalam prospek ekonomi 2015 -2019 yang diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup :

- Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan & pengangguran
- Moneter
- Neraca Pembayaran
- Keuangan Negara & Fiskal

Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC) 2015 merupakan sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, serta dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli.

Perekonomian Indonesia - Lydia Kurniawan SE.M.Ak

40